



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**



LKjIP

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah diucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin dan kesempatan yang diberikan-Nya jugalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan.

LKjIP ini pada dasarnya merupakan laporan yang menggambarkan sejauh mana pencapaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022. Pencapaian target kinerja dari sasaran strategis tersebut mengacu dan mempertimbangkan target kinerja pada dokumen perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Dalam LKjIP ini juga digambarkan mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta visi, misi, struktur organisasi, tujuan dan sasaran strategis DPMPTSP. Adapun penyusunan LKjIP ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai sebuah laporan, tentunya tidak luput dari kekurangan. Karena itu diharapkan masukan dan saran untuk perbaikan ke depan. Demikianlah laporan ini disusun dan disampaikan, atas segala perhatiannya diucapkan terimakasih.

Tanjung Pati, Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU



ANETA BUDI PUTRA, AP, M. Si
Nip.19750515 199501 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI -----	ii
DAFTAR TABEL -----	iii
DAFTAR DOKUMENTASI -----	iv
IKHTISAR-----	1
BAB I PENDAHULUAN -----	3
1.1. Latar Belakang -----	3
1.2. Tugas dan Wewenang -----	4
1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi	8
1.4 Sumber Daya Perangkat Daerah -----	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA -----	11
A. Rencana Strategis DPMPTSP -----	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA-----	39
A. Metode Pengukuran Capaian Target Kinerja -----	39
B. Hasil Pengukuran Kinerja -----	40
C. Analisis dan Capaian Kinerja -----	41
D. Capaian Kinerja DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat	48
E. Realisasi Anggaran -----	51
F. Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun Sebelumnya ----	64
BAB IV PENUTUP -----	67
4.1. Kesimpulan -----	67
4.2 Rekomendasi -----	68
Daftar Lampiran -----	69

LKJiP Tahun 2022

1. Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2022-----	69
2. Lampiran Buku Inventaris-----	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Pendidikan pegawai DPMPTSP-----	9
Tabel 2. Inventaris DPMPTSP (Lihat Lampiran)-----	10
Tabel 2.1.Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja DPMPTSP -----	16
Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP-----	17
Tabel 2.3 Arah Kebijakan,Program dan Indikator Program -----	19
Tabel 2.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah -----	21
Tabel 2.5 Target Kinerja Tahun 2022-2026 -----	22
Tabel 2.6 Target Kinerja Program,Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah DPMPTSP-----	23
Tabel 3.1Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja-----	39
Tabel 3.2Capaian Kinerja DPMPTSP Tahun 2012 -----	40

DAFTAR DOKUMENTASI

✓ Foto Sosialisasi dan Bimbingan Teknis -----	43
✓ Foto Pengawasan Bidang Usaha Peternakan PT. Radja Poultry Shop di Kecamatan Guak-----	44
✓ Foto Pengawasan PT. Wahana Wisata Indonesia di Nagari Tarantang Kecamatan Harau-----	45
✓ Foto Pelayanan-----	46
✓ Foto Pengawasan Bidang Usaha Pertambangan di PT. Anshar Terang Crushindo -----	45

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2021 – 2026 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada tahun 2023 mendapat alokasi dari dana APBD sebesar Rp.4.782.343.813,- setelah Perubahan APBD Tahun 2023 menjadi Rp. 3.595.841.746,- dengan sumber dana DAU Rp.3.095.041.746,- DAK 500.800.000,- dengan penyerapan dana sebesar Rp.3.490.339.105,- atau persentase penyerapan sebesar 97,07%. Tahun 2022 persentase penyerapan anggaran 97,70% berarti terjadi penurunan penyerapan sebesar 0,63% hal ini disebabkan karena bersisanya belanja Gaji dan DAK. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal.

Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal di alokasikan untuk pelaksanaan 2 Program dan 6 kegiatan 25 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang Pengendalian Penanaman Modal . Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 khususnya yang terkait dengan program

LKJiP Tahun 2023

dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebesar Rp.419.695.000 dengan realisasi anggaran Rp. 382.182.500 dimana persentase capaiannya yaitu 91,06%, capaian target-target sasaran strategis mengalami penurunan sebesar 0,07%, dimana tingkat serapan pada tahun lalu adalah sebesar 98,37%, untuk Realisasi Fisik dari 2 Program, 6 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan sebesar 100%.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Dalam undang-undang tersebut diatas disebutkan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Mebteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, akan disusun pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran untuk penyelenggaraan urusan penanaman modal berupa pelayanan perizinan dan non perizinan dalam Tahun Anggaran 2022.

Pelaporan kinerja ini berisi ringkasan/ikhtisar uraian singkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya dapat tercapai sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelaynan Terpadu Satu Pintu Kabuaten Lima Pulh Kota tahun 2021-2026.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program pelayananan perizinan dan non perizinan agar mampu eksis dan unggul, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puuh Kota melakukan perencanaan dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

1.2 Tugas dan Wewenang

a. Kedudukan

Sesuai Peraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral. . Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, ssunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang urusan penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Penanaman Modal;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsi.

b. Struktur Organisasi.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - Kelompok jabatan fungsional Sub-substansi keuangan;
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Pelaporan
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari :
 - Analis kebijakan Madya Koordinator Perencanaan dan Pengembangan
 - Analis Kebijakan Muda Sub Koordiantor Penyuluh Penanaman Modal
 - Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator Regulasi Penanaman Modal
 - Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator Perencanaan Potensi dan Pelang Investasi

4. Bidang Promosi terdiri dari :
- Analis Kebijakan Madya Koordinator Promosi
 - Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator Promosi
 - Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Promosi
 - Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator Data dan Informasi.

5. Bidang Pelayanan Terpadu terdiri dari :
- Analis Kebijakan Madya Koordinator Pelayanan Terpadu
 - Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator Analis Kebijakan Pelayanan Perizinan Umum
 - Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Penanaman Modal
 - Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya

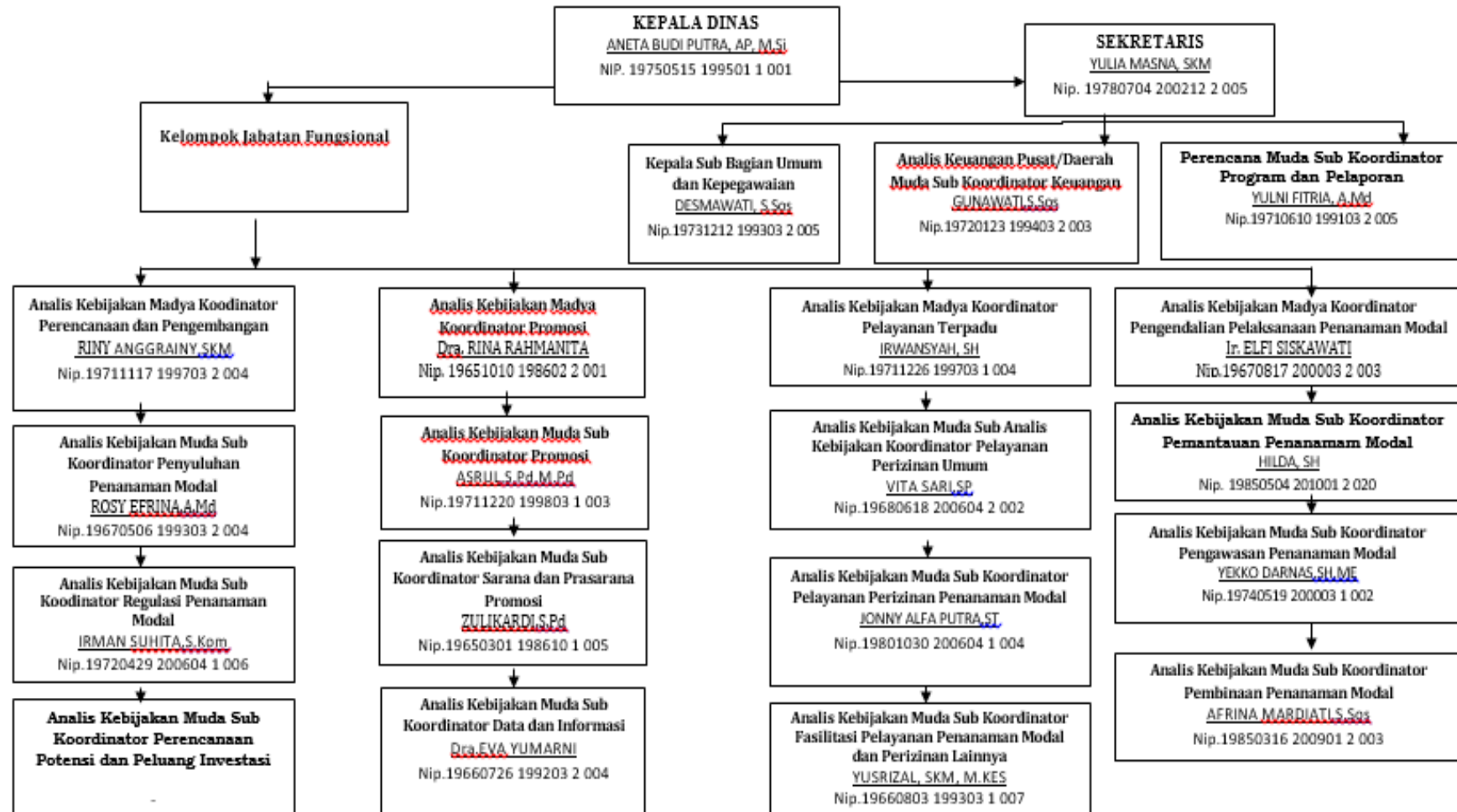
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari :

- Analis Kebijakan Madya Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator Pemantauan Penanaman Modal
- Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator Pengawasan Penanaman Modal
- Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator Pembinaan Penanaman Modal

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada bagan berikut :

STRUKTUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Uraian aspek-aspek strategi organisasi dapat ditentukan oleh faktor-faktor penentu keberhasilan / critical succes factor (CSF) sebagai berikut :

- a. Tersedianya aparatur profesional untuk mendorong meningkatkan kinerja, transparan dan persaingan yang sehat;
- b. Adanya sistem pelayanan prima yang mudah, aman, cepat, efisien, ekonomis, adil, transparan dan tepat sasaran;
- c. Adanya komitmen aparatur untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja;
- d. Adanya keselarasan kebijakan Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah;
- e. Berfungsinya mekanisme, prosedur dan pola kerja yang efektif dan efisien untuk penyederhanaan birokrasi (debirokrasi) dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan secara prima;
- f. Optimalisasi koordinasi di Daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat melalui sistem informasi manajemen pembangunan Daerah;
- g. Adanya kebijakan pola pembinaan aparatur sesuai dengan potensi dan kepentingan Daerah yang didasari oleh kebijakan strategis rasional;
- h. Intensifikasi Diklat Teknis Fungsional untuk aparatur.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tentunya tidak luput dari permasalahan-permasalahan yang menjadi faktor penghambat yang mungkin ditemukan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu. Adapun beberapa permasalahan-permasalahan dapat diinventarisir sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur yang akan melaksanakan program dan kegiatan.

LKJiP Tahun 2023

2. Belum optimalnya koordinasi, sinergitas, sinkronisasi dengan Perangkat Daerah lainnya maupun dengan stakeholders.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan perizinan yang optimal.
4. Masih minimnya alokasi anggaran operasional untuk pencapaian target pelayanan perizinan.

1.4. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya

Sumber Daya Manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota berjumlah 41 orang terdiri dari 30 orang PNS , 10 Orang Tenaga Harian Lepas (THL), secara Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) Eselon terdiri dari 1 kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas, 1Kasub Bag dan 18 jabatan fungsional yang terdiri dari Analis Kebijakan Madya, Analis Kebijakan Muda dan Perencana Muda., Analis keuangan Pusat/Daerah Muda.

Tabel 1. Tingkatan pendidikan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
	PNS	
1	S2 (Pasca Sarjana)	4
2	S1 (Sarjana)	19
3	DIII (Sarjana Muda)	3
4	SLTA	4
5	SMP	
	Jumlah PNS	30
	THL	
1	S1 (Sarjana)	3
2	DIII (Sarjana Muda)	1
3	SMA	6
4	SMP	
	Jumlah PHL	10
	TOTAL	40

Sarana Prasarana

Tabel 2. Buku Inventaris (Lihat Lampiran)

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan. Pada Bab ini berisi Latar belakang, tugas dan wewenang, aspek strategis dan permasalahan utama organisasi dan sumber daya perangkat daerah
- BAB II : Memuat tentang Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PK tahun 2023
- BAB III : Metodologi pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja, analisis dan capaian, realisasi anggaran
- BAB IV : Penutup, berisi Kesimpulan dan rekomendasi membahas kesimpulan dan langkah langkah di masa datang

Lampiran

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB II

PERENCANAAN DAN

PERJANJIAN

KINERJA

A. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat 2 menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 111 menyebutkan bahwa penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

1. Pendahuluan;
2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

LKJiP Tahun 2023

3. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan sasaran;
5. Strategi dan arah Kebijakan;
6. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
8. Penutup.

a. Visi

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 adalah:

“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”

Visi Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, memperhatikan RPJMN 2020-2024, RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025, dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2025.

b. Misi

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut diatas adalah melalui 5 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai keagamaan;
2. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional;
3. Meningkatkan potensi nagari dalam pembangunan daerah;

LKJiP Tahun 2023

4. Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui reformasi birokrasi seutuhnya;
5. Meningkatkan pembangunan insfrastruktur secara terpadu dan berkelanjutan

Untuk mewujudkan misi dituangkan kedalam 10 agenda prioritas pembangunan antara lain:

1. Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak;
2. Peningkatan peran limbago adat;
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas akses jalan daerah, antar daerah dan provinsi;
4. Pembangunan kawasan pinggiran, strategis dan cepat tumbuh;
5. Peningkatan Mutu Pendidikan;
6. Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat;
7. Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis;
8. Pengembalian fungsi kawasan yang berkelanjutan;
9. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;dan
10. Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Lima Puluh Kota Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjalan misi keempat yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui reformasi birokrasi seutuhnya”

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Untuk mendukung Visi dan Misi tersebut di atas, pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan **Urusan Penanaman Modal** dengan **Strategi Kedelapan** Reformasi biroksi dan peningkatan pelayanan publik dengan program unggulan “Penguatan kualitas pelayanan public berbasis teknologi informasi dan didukung standar pelayanan dan standar operasional prosedur”.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota diarahkan untuk membangun dan mengembangkan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai lembaga pelayanan publik khususnya bidang perizinan dan non perizinan yang mandiri dan profesional.

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi kecenderungan perkembangan di masa yang akan datang, dengan dua komponen pendukung yaitu Meningkatkan investasi dan meningkatkan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan.

Kedua komponen ini dijadikan sebagai panduan utama bagi DPMPTSP yang menyusun serangkaian kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan untuk periode 2021–2026 dengan sasaran Meningkatnya nilai investasi, meningkatnya realisasi investasi dan meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat.

Pelayanan publik sangat strategis sebagai entry point untuk mewujudkan smart governance. Perbaikan dan peningkatan pelayanan publik dianggap memiliki dampak luas dan berpengaruh terhadap perbaikan manajemen kinerja, sikap mental, prilaku dan menumbuhkan kepedulian dan komitmen aparat daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tugas utama pemerintah terhadap rakyatnya adalah memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.

Berkaitan dengan tugas pelayanan publik dikenal istilah pelayanan prima berasal dari kata "Excellent Service" yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau terbaik. Disebut pelayanan sangat baik atau terbaik karena disesuaikan dengan standar pelayanan yang berlaku atau yang dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan :

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.
2. Partisipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
3. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.
4. Berkelanjutan. Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.
5. Transparansi. Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

6. Keadilan. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

Untuk menjelaskan dan menjabarkan visi kedalam bentuk yang lebih terukur, perlu disusun serangkaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan menggambarkan target dan capaian tertentu dalam satu periode. Dalam konteks ini, periode pencapaian tujuan yang direncanakan adalah selama lima tahun. Tujuan yang ditetapkan mengacu kepada visi dan misi serta berdasarkan kepada isu-isu strategis penanaman modal. Adapun beberapa tujuan yang telah dirumuskan adalah:

Tabel 2.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja DPMPSTSP :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatkan nilai rencana investasi dan realisasi investasi	Meningkatnya Investasi	1. Jumlah investor berskala Nasional (PMDA/PMA) 2. Nilai investasi berskala Nasional(PMDN/PMA) 3. Nilai Realisasi PMDN 4. Nilai Realisasi PMA
2. Meningkatkan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan	Meningkatnya mutu pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPSTSP	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPSTSP	Nilai Sasaran Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan OPD

Untuk mencapai sasaran tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan 2 Program :

1. Program Penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Dalam rangka untuk mencapai sasaran di atas maka diperlukan koordinasi dengan semua pihak baik dengan pemerintah, instansi terkait provinsi, kabupaten/kota, dan dunia usaha. Selain itu, diperlukan strategi dan kebijakan yang secara kongkrit yang dapat dijadikan sebagai pendekatan pencapaian visi institusi untuk satu periode ke depan. Strategi yang disusun perlu difokuskan kepada setiap tujuan agar program yang akan disusun tidak menyimpang dari upaya mencapai visi 2021.

Strategi dan kebijakan yang disusun dihubungkan secara langsung dengan setiap misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Metode penjelasan ini dianggap lebih efektif untuk memperlihatkan korelasi antar desain yang disusun. Hubungan setiap rumusan tersebut dijelaskan pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

MISI : Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui reformasi birokrasi seutuhnya;

LKJiP Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Nilai Rencana Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatkannya investasi	Nilai Rencana Investasi (Milyar)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi aturan terkait perizinan dan non perizinan 2. Membuat kajian tentang Potensi Investasi (Fs) 3. Sosialisasi Kebijakan terkait perizinan dan non perizinan 4. Melakukan promosi potensi dan produk unggulan daerah
		Nilai Realisasi Investasi (Milyar)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitas permasalahan investor 2. Melakukan Pengawasan Pemantauan dan Pembinaan terhadap pelaku investasi 3. Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah 4. Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal 5. Pengembangan sistem informasi penanaman modal
		Jumlah Investor :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi aturan terkait perizinan dan non perizinan 2. Membuat kajian tentang Potensi Investasi (Fs) 3. Sosialisasi Kebijakan terkait perizinan dan non

Meningkatkan mutu pelayanan perizinan	Meningkatnya mutu pelayanan perizinan	Skor IKM	<p>perizinan</p> <p>4. Melakukan promosi potensi dan produk unggulan daerah</p> <p>1. Meningkatkan sarana</p> <p>2. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan</p> <p>3. Merumuskan kebijakan daerah terkait perizinan</p>
Meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP	Nilai SAKIP OPD	<p>1. Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</p> <p>2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</p>

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Program dan indikator program target kinerja dan pendanaan sesuai table dibawah ini Tabel 2.3 dan tabel 2.4

Tabel. 2.3
Arah Kebijakan, Program dan Indikator Program

Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	
		Uraian	%
Melengkapi aturan terkait perizinan dan non perizinan	Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase pengembangan iklim penanaman modal	%
Membuat kajian tentang potensi investasi	Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase pengembangan iklim penanaman modal	%
Sosialisasi kebijakan terkait perizinan dan non perizinan	Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase pengembangan iklim penanaman modal	%

LKJiP Tahun 2023

Melakukan promosi potensi produk unggulan daerah	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase rencana investasi	%
Memfasilitasi permasalahan investor	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase realisasi investasi	%
Melakukan pengawasan, pemantauan dan pembinaan	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase realisasi investasi	%
Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Program pelayanan penanaman modal	Skor Indeks kepuasan masyarakat	Jumlah
Penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Program pelayanan penanaman modal	Skor Indeks kepuasan masyarakat	Jumlah
Pengembangan sistem informasi penanaman modal	Program pelayanan penanaman modal	Skor Indeks kepuasan masyarakat	Jumlah

Tabel 2.4**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
1.	Meningkatkan investasi	Meningkatnya investasi	1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN,PMA) 3. Nilai realisasi investasi (PMA) 4. Nilai realisasi investasi (PMDN)
2.	Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan	Meningkatnya mutu pelayanan perizinan dan non perizinan	Skor IKM
3.	Meningkatkan Nilai AKIP	Meningkatnya nilai AKIP	SAKIP OPD

Tabel. 2.5
Target Kinerja Tahun 2021-2026

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	2.926	3.073	3.226	3.388	3.557	3.735
Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	381.938.600.769	401.035.530.807	421.087.307.347	442.141.672.715	464.248.756.350	487.461.194.168
Nilai realisasi investasi (PMDN)	362.062.746.581	380.165.883.910	399.174.178.105	419.132.887.011	440.089.531.361	462.094.007.929
Nilai realisasi investasi (PMA)	2.185.689.923	2.294.974.419	2.409.723.140	2.530.209.292	2.656.719.761	2.789.555.749
Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	84,8	84,9	85	85	85,2	85,3
Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	71	71	71	71	72	72

Tabel 2.5
Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah		20 %	5,974,219,910	20 %	6,731,322,564	20 %	7,304,300,000	20 %	8,009,200,000	20 %	8,757,900,000	100 %	36,776,176,000	DPMPTSP	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah		17 Dokumen	97,5	17 Dokumen	120,8	17 Dokumen	127	17 Dokumen	145,5	17 Dokumen	162	85 Dokumen	652,8	DPMPTSP	

LKJiP Tahun 2023

		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dok	30	2 Dok	35	2 Dok	36	2 Dok	40	2 Dokmen	44	10 Dok	185	DPMPT SP	
		X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	7,5	1 Dokumen	8,6	1 Dokumen	9	1 Dokumen	11	1 Dokumen	13	5 Dokumen	49,1	DPMPT SP	
		X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	7,5	1 Dokumen	8,6	1 Dokumen	9	1 Dokumen	10	1 Dokumen	12	5 Dokumen	47,1	DPMPT SP	
		X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	5,5	1 Dokumen	8,6	1 Dokumen	10,	1 Dokumen	12,5	1 Dokumen	15	5 Dokumen	51,6	DPMPT SP	
		X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil		1 Dokumen	6	1 Dokumen	10	1 Dokumen	12	1 Dokumen	15	1 Dokumen	16	5 Dokumen	59	DPMPT SP	

LKJIP Tahun 2023

				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD														
		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 Dokumen	11,3	5 Dokumen	15	5 Dokumen	16	5 Dokumen	17	5 Dokumen	17	25 Dokumen	76,3	DPMPT SP
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Dokumen	29,7	6 Dokumen	35	6 Dokumen	35	6 Dokumen	40	6 Dokumen	45	30 Dokumen	184,7	DPMPT SP
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah		12 Bln	4.33 6.26 8.91 0	12 Bln	4.83 3.32 2.56 4	12 Bln	5.25 0.00 0.00 0	12 Bln	5.77 6.50 0.00 0	12 Bln	6.35 3.50 0.00 0	12 Bln	26.5 49.8 91.4 74	DPMPT SP
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bln	4.31 5.56 8.91 0	12 Bln	4.80 8.32 2.56 4	12 Bln	5.22 1.00 0.00 0	12 Bln	5.74 4.00 0.00 0	12 Bln	6.31 8.00 0.00 0	60 Bln	26.4 06.8 91.4 74	DPMPT SP

LKJIP Tahun 2023

		X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 lap	7,7	1 lap	10	1 lap	12	1 lap	14,5	1 lap	17	5 Laporan	61,2	DPMPT SP	
		X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		2/ 12 Bulan	7,2	2/ 12 bulan	8	2/12 bulan	8,5	2/ 12 bulan	9	2/ 12 bulan	9	8/60 bulan	41,7	DPMPT SP	
		X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Laporan	5,8	1 lap	7	1 Lap	8,5	1 lap	9	1 Lap	9,5	5 lap	40,1	DPMPT SP	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya sarana penunjang administrasi kepegawaian dinas		10 Orang	34	15 orang	40	20 orang	55	30 orang	65	35 orang	70	110 orang	264	DPMPT SP	

LKJiP Tahun 2023

		x.xx. 01.2. 05.1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		10 orang	34	15 orang	40	20 orang	55	30 orang	65	35 orang	70	110 orang	264	DPMPT SP	
		X.XX. 01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Pelayanan Umum Perangkat Daerah		12 bulan	299,5	12 bulan	397,3	12 bulan	417,8	12 bulan	439,2	12 bulan	460,2	60 bulan	2014	DPMPT SP	
		X.XX. 01.2. 06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12 Bulan	9	12 Bulan	10	12 Bulan	11	12 Bulan	12	12 Bulan	13	60 Bulan	55	DPMPT SP	
		X.XX. 01.2. 06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	31	12 Bulan	30	12 Bulan	32	12 Bulan	35	12 Bulan	36	60 Bulan	164	DPMPT SP	
		X.XX. 01.2. 06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		12 Bulan	9	12 Bulan	10	12 Bulan	16	12 Bulan	17	12 Bulan	19	60 Bulan	71	DPMPT SP	
		X.XX. 01.2. 06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		12 Bulan	7	12 Bulan	8	12 Bulan	9	12 Bulan	10	12 Bulan	11	60 Bulan	45	DPMPT SP	

LKJiP Tahun 2023

		X.XX. 01.2. 06.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedia a Barang Cetak dan pengandaan		12 Bula n	34,5	12 Bula n	37,9	12 Bula n	40,2	12 Bula n	43,2	12 Bula n	46,6	60 Bula n	202,4	DPMPT SP	
		X.XX. 01.2. 06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedia a Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12 Bula n	4	12 Bula n	4,4	12 Bula n	4,6	12 Bula n	5	12 Bula n	5,6	60 Bula n	23,6	DPMPT SP	
		X.XX. 01.2. 06.0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksanay a Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Bula n	20	12 Bula n	22	12 Bula n	25	12 Bula n	27	12 Bula n	29	60 Bula n	123	DPMPT SP	
		X.XX. 01.2. 06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD		12 Bula n	185	12 Bula n	275	12 Bula n	280	12 Bula n	290	12 Bula n	300	60 Bula n	1330	DPMPT SP	
		X.XX. 01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedia n a Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	509,951	-	550	-	567	-	612		655	-	2892,976	DPMPT SP	
		X.XX. 01.2. 07.0 4	Pengadaan Kendaraan Dinas	Tersedia n a kendaaraan Dinas		3 unit	409,975	3 unit	440	3 unit	450	3 unit	490	3 unit	525	15 unit	2.314	DPMPT SP	

LKJIP Tahun 2023

			Operasional/ Lapangan	Operasional atau Lapangan															
		X.XX. 01.2. 07.0 5	Pengadaan Mebel	Tersedia Mebel		1 pake t	49,9 01	1 pake t	55	1 pake t	57	1 pake t	59	1 pake t	63	5 pake t	283, 901	DPMPT SP	
		X.XX. 01.2. 07.0 6	Pengada an Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedia Peralatan dan Mesin Lainnya		3 unit	50,0 75	3 unit	55	3 unit	60	3 unit	63	3 unit	67	15 unit	295, 075	DPMPT SP	
		X.XX. 01.2. 08	Penyedia an Jasa Penunjan g Pemerint ahan Daerah	Persentase Tersedia n Jasa Penunjan g Pemerint ahan Daerah		12 bula n	247	12 bula n	294, 9	12 bula n	331, 5	12 bula n	360	12 bula n	385, 2	60 bula n	1618 ,6	DPMPT SP	
		X.XX. 01.2. 08.0 1	Penyedia an Jasa Surat Menyura t	Terlaksana nya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bula n	5,5	12 Bula n	6	12 Bula n	6,5	12 Bula n	7	12 Bula n	7,2	60 Bula n	32,2	DPMPT SP	
		X.XX. 01.2. 08.0 2	Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedia n Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bula n	45,5	12 Bula n	47,9	12 Bula n	55	12 Bula n	60	12 Bula n	63	60 Bula n	271, 4	DPMPT SP	
		X.XX. 01.2. 08.0 4	Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor	Tersedia n Jasa Pelayanan Umum kantor		12 Bula n	196	12 Bula n	241	12 Bula n	270	12 Bula n	293	12 Bula n	315	60 Bula n	1,31 5	DPMPT SP	

LKJiP Tahun 2023

		X.XX. 01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah		12 bulan	450	12 bulan	495	12 bulan	556	12 bulan	611	12 bulan	672	12 bulan	2784	DPMPT SP	
		X.XX. 01.2. 09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		12 bulan	130	12 bulan	143	12 bulan	168	12 bulan	185	12 bulan	203	60 bulan	829	DPMPT SP	
		X.XX. 01.2. 09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12 Bulan	20	12 Bulan	22	12 Bulan	25	12 Bulan	27	12 Bulan	30	60 Bulan	124	DPMPT SP	
		X.XX. 01.2. 09.1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau		6 bulan	300	6 bulan	330	6 bulan	363	6 bulan	399	6 bulan	439	30 bulan	1,831	DPMPT SP	

LKJiP Tahun 2023

				Bangunan Lainnya															
		02	POGRAM PENGEM BANGAN IKLIM PENANA MAN MODAL	Persentase pengemb an iklim penanaman modal		5	191, 26	15	277, 74	10	434, 10	10	438, 23	10	390, 00	60	2024 ,70	DPMPT SP	
		x.xx. 02.2. 01	Penetapa n Pemberi an Fasilitasi / Insentif Dibidang Penanam an Modal yang Menjadi Kewenan gan Daerah Kabupat en/Kota	Terlaksana nya pembentuk an kebijakan dan sosialisasi kebijakan penanaman modal		20 %	116, 26	20 %	102, 5	20 %	175	20 %	150	20 %	250	100 %	793, 76	DPMPT SP	
		X.XX. 02.2. 01.0 1	Penetapa n Kebijakan Daerah Mengena i Pemberia n Fasilitas/ Insentif dan Kemudah an Penanam an Modal	Ditetapan nya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudah an Penanaman Modal		3 Kebijakan akan	66,2 6	3 Kebijakan akan	65	3 Kebijakan akan	150	3 Kebijakan akan	75	3 Kebijakan akan	175	15 Kebijakan akan	531, 26	DPMPT SP	

LKJIP Tahun 2023

		X.XX.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah		4 Perte muan	50	3 Pert emuan	37,5	2 Pert emuan	25	6 Pert emuan	75	6 Pert emuan	75	21 Pert emuan	262,5	DPMPT SP	
		x.xx.02.2.02	Pembuat an Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Tersedianya peta potensi investasi		2 doku men	75	2 doku men	175,24	2 doku men	259,1	2 doku men	288,23	2 doku men	140	10 Doku men	937,57	DPMPT SP	
		X.XX.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah		1 Doku men	10	1 Doku men	150	1 Doku men	150	1 Doku men	150	1 Doku men	10	5 Doku men	470	DPMPT SP	
		X.XX.02.2.02.02	Penyediaan Peta potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha		1 Doku men	65	1 Doku men	25,24	1 Doku men	109,10	1 Doku men	138,23	1 Doku men	130	5 doku men	467,57	DPMPT SP	
		03	PROGRA M PROMOS I PENANA MAN MODAL	Persentase rencana investasi		10	48,883	10	70,17	10	74,30	10	75,34	20	98,71	60	429,31	DPMPT SP	

LKJiP Tahun 2023

		x.xx. 03.2. 01	Penyenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan promosi penanaman modal		20 %	43,83	20 %	70,17	20 %	74,3	20 %	83,34	20 %	98,71	20 %	335,25	DPMPT SP	
		X.XX. 03.2. 01.0 1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersusunnya Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal		1 tahun	5	1 tahun	10	1 tahun	10	1 tahun	10	1 tahun	15	5 tahun	50	DPMPT SP	
		X.XX. 03.2. 01.0 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal		2 kali	38,83	2 kali	60,17	2 kali	64,3	2 kali	73,34	2 kali	83,71	10 kali	320,25	DPMPT SP	
		04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat		20	122	20	106	20	114	20	116	20	152	100	610	DPMPT SP	
		x.xx. 04.2. 01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu		20	122	20	106	20	114	20	116	20	152	20	610	DPMPT SP	

LKJiP Tahun 2023

			Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	satu pintu dibidang penanaman modal														
		X.XX.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedia nya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/ Kota		3 Aplikasi	44	3 Aplikasi	28	3 Aplikasi	31	3 Aplikasi	32	3 Aplikasi	44	3 Aplikasi	179	DPMPT SP
		X.XX.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan non perizinan penanaman		1100 Dokumen	29	1120 dokumen	29	1130 dokumen	32	1140 dokumen	32	1150 dokumen	44	5640 dokumen	166	DPMPT SP

LKJiP Tahun 2023

				modal lintas daerah Kabupaten/ Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha															
		X.XX.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Layanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		15 pengaduan	20	15 pengaduan	20	15 pengaduan	20	15 pengaduan	20	15 pengaduan	20	15 pengaduan	100	DPMPT SP	
		X.XX.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah Kabupaten / Kota Bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha		6 Rapat 36 Survey	29	6 Rapat 36 Survey	29	6 Rapat 36 Survey	31	6 Rapat 36 Survey	32	6 Rapat 36 Survey	44	6 Rapat 36 Survey	165	DPMPT SP	

LKJiP Tahun 2023

		05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi		20 %	153,82	20 %	221,02	20 %	234,04	20 %	237,33	20 %	310,92	100 %	1,157,130	DPMPT SP	
		x.xx.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal		20 %	153,82	20 %	221,02	20 %	234,04	20 %	237,33	20 %	310,92	100 %	1,157,130	DPMPT SP	
		X.XX.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha		40 Investor	31,674	55 investor	44,714	60 investor	46,828	65 investor	48,13	70 investor	62,92	290 investor	234,266	DPMPT SP	

LKJiP Tahun 2023

		X.XX.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha		100 Perusahaan	76	125 perusahaan	110	150 perusahaan	117	175 perusahaan	118	200 perusahaan	155	750 perusahaan	576	DPMPT SP	
		X.XX.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha		70 Perusahaan	46,146	80 perusahaan	66,306	90 perusahaan	70,212	100 perusahaan	71,2	105 perusahaan	93	445 perusahaan	346,864	DPMPT SP	
		06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah data laporan perizinan dan non perizinan penanaman modal		19 Laporan	64,720,400	19 Laporan	77,884,480	19 Laporan	80	19 Laporan	85	19 Laporan	90	95 Laporan	397.384.880	DPMPT SP	

LKJiP Tahun 2023

		X.XX. 06.2. 01.0 1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah Dikaji dan Dimanfaatkan		19 Laporan	64,7 20,4 00	19 Laporan	77,8 84,4 80	19 Laporan	80	19 Laporan	85	19 Laporan	90	95 Laporan	397. 384. 880	DPMPT SP	
		X.XX. 06.2. 01.0 1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Adanya Laporan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang sudah diterbitkan		19 Laporan	64,7 20,4 00	19 Laporan	77,8 84,4 80	19 Laporan	80	19 Laporan	85	19 Laporan	90	95 Laporan	397. 384. 880	DPMPT SP	

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.

Dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis kinerja DPMPTSP tahun 2023, metode yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Untuk penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan / kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan / kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan
Capaian Indikator Kinerja

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1.	91 % - 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 % - 90 %	Tinggi
3.	66 % - 75 %	Sedang
4.	51 % - 65 %	Rendah
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2021 s/d 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2021 s/d 2023	Persentase Peningkatan
1.	Meningkatnya Investasi	1. Jumlah Investor Berskala lokal/Nasional	3,073	2.299	4.916	3.226 Investor	4.916	9.822	100,1 %
		2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Lokal/Nasional	401,035,530,807	158.544.549.360	302.075.646.608	421.087.307.347	1.127.523.877.010	1.429.599.523.618	373,4 %
		3. Nilai Realisasi Investasi PMDN	380,165,883,910	607.796.454.147	1.508.047.641.034	399.174.178.105	627.483.288.235	2.135.530.929.269	41,57 %
		4. Nilai Realisasi Investasi PMA	2,294,974,419	3.811.859.075	19.098.707.255	2.409.723.140	4.536.268.077	23.634.975.332	23,70 %
2.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Skor IKM	84,9	84,8	84,8	Skor 84,9 (B)	85,8	85,8	1,17 %
3.	Meningkatnya Nilai AKIP	Skor OPD	71	69,33 (B)	69,33 (B)	71 (B)	67,15 (B)	67,15 (B)	Penurunan 3,14 %

C. Analisis dan Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Investasi

1. Jumlah investor berskala lokal/nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investor dihitung dari banyaknya jumlah pengurusan NIB yang terjadi pada tahun itu dan diakumulasikan dengan tahun-tahun sebelumnya (2021 s/d 2023). Sampai tahun 2022 berjumlah 4.906, tahun 2023 sebanyak 4.916 total sampai tahun 2023 adalah 9.882, dengan demikian persentase peningkatan jumlah investor dari tahun 2022 ke tahun 2023 adalah 100,01%

2. Jumlah Nilai investasi berskala lokal/nasional (PMDN/PMA), mengacu pada total investasi yang diusulkan atau diajukan oleh investor dan itupun disetujui oleh Dinas Penanaman Modal atau Lembaga, dimana nilai investasi ini bersifat provisional, Nilai tersebut dapat berubah seiring dengan perkembangan proyek dan kemungkinan perubahan dalam skala atau rencana investasi. Tahun 2021 Sampai dengan tahun 2022 Rp. 302.075.646.608, sampai tahun 2023 senilai Rp.1.492.599.523.618 dengan demikian terjadi peningkatan sebesar 373,4 %. Peningkatan ini terjadi karena peningkatan promosi dan sosialisasi serta bimbingan teknis penanaman modal..

3. Nilai Realisasi Investasi PMDN.

Nilai realisasi investasi PMDN tahun 2022 sebesar 5.173.426.051.626, dengan total investasi tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 Rp. 1.508.047.641.034 tahun 2023 627. 483.288.235 maka total investasi PMDN sampai tahun 2023 adalah Rp.2.135.530.929.269, dengan demikian persentase peningkatan realisasi investasi PMDN sebesar 41,57%. Realisasi investasi dihitung berdasarkan laporan LKPM yang dilakukan oleh investor yang dihitung berdasarkan penjumlahan modal tetap dengan modal kerja.

LKJiP Tahun 2023

4. Nilai realisasi investasi PMA

Total nilai realisasi investasi tahun 2021 sampai tahun 2023 Rp.23.634.975.332,- nilai realisasi investasi tahun 2022 sebesar 19.098.707.255 , tahun 2023 sebesar Rp.4.536.268.077, maka persentase peningkatannya sebesar 23,70%. Dihitung berdasarkan laporan LKPM yang dilakukan oleh pelaku usaha penanaman modal asing.



Foto Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

LKJiP Tahun 2023





Pengawasan bidang usaha peternakan PT. Radja Poultry Shop di Kecamatan Guguak



Pengawasan PT. WahanaWisata Indonesia di Nagari Tarantang Kec.Harau

Sasaran Strategis 2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran pendapat masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota.

LKJIP Tahun 2023

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini merupakan tolok ukur evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk masa berikutnya.

Untuk tahun 2022, Bulan Januari sampai Juni nilai IKM sebesar 86,506, bulan Juli sampai Desember nilainya 83,121. Untuk menghitung total IKM maka dijumlahkan semester satu dan semester, dua dibagi dua. Maka total IKM 84,8. Pada tahun 2023 nilai IKM sebesar 85,8, dengan demikian terjadi kenaikan IKM sebesar 1,17%. IKM dihitung berdasarkan IKM yang isi oleh masyarakat atau orang yang mendapatkan pelayanan.



Foto Pelayanan

**Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja
DPMPTSP**

Dalam penilaian akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan memperhatikan beberapa indikator penilaian dan bobot. Bobot dan Nilai DPMPTSP Tahun 2022 sebagai berikut :

No.	Indikator Penilaian	Bobot%	Nilai %
1	Perencanaan kinerja	30	21,00
2	Pengukuran kinerja	30	20,40
3	Pelaporan kinerja	15	9,75
4	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	25	16
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	67,15

Dilihat dari tabel diatas maka capaian 4 indikator kinerja sasaran strategis sebesar **67,15**. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/ kegagalan yang ditetapkan, pencapaian sasaran ini termasuk berhasil dengan kategori penilaian B .Ditahun 2021 nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar 69,33. Dengan demikian ada penurunan sebesar 2,18 %.

LKJiP Tahun 2023

D. Capaian Kinerja DPMPSTSP Provinsi Sumatera Barat

Tabel 3.3
Hasil Pengukuran Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023

1	MISI/TUJUAN/	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	~	1. Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	8%	38,65%	483 %
		1. Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat *)	1. Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (ribu US \$) N (juta Rp.) (juta Rp.)	70.000,00 4.594.670,00 5.602.670,00	67.092,60 6.219.016,80 7.211.987,28	95,85% 135,35% 128,72%
		2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,75 / 3,41	96,48 / 3,81	116,59 %/ 111,73%
2.	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	~	2. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A / 80,25	BB / 79,63	99,23%
		3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	A. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A / 80,25	BB / 79,63	99,23%

*) *Olehan Rumpun Penanaman Modal DPMPSTSP Provinsi Sumatera Barat 2023 Kondisi triwulan 3*

LKJiP Tahun 2023

Dari tabel 3.3 diketahui dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja, yakni 2 (dua) indikator kinerja utama dan 1 (satu) kinerja pendukung yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2023, dimana 2 (dua) indikator kinerja utama sasaran strategis yaitu Nilai Realisasi PMA dan PMDN dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berada pada level **Memuaskan** dengan realisasi sebesar **Rp. 7.211.987.280.000,-** dari target sebesar **Rp. 5.602.670.000.000,-** dengan capaian kinerja sebesar **128,72%** dan sebesar **96,48/3,81** dari target **82,75/3,41** dengan capaian kinerja **116,59%/111,73%** serta 1 (satu) kinerja pendukung dengan indikator kinerja sasaran strategis berada pada level **Sangat Baik** dengan capaian kinerja sebesar **99,23%**, dimana realisasi sebesar **BB/79,63** dari target **A/80,25** untuk indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

Dibandingkan dengan hasil capaian kinerja indikator kinerja tahun 2022, hasil capaian kinerja dari indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun 2023 sebesar **128,72%** mengalami kenaikan sebesar **23,27% (105,46%)** dan hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 sebesar **96,48** mengalami peningkatan sebesar **1,13 (95,35)** serta hasil capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2023 sebesar **79,63** mengalami peningkatan sebesar **0,24 (79,39%)**.

3.3. CAPAIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023.

Tujuan 1.1

“Meningkatnya Pertumbuhan Investasi”

Pencapaian tujuan *“Meningkatnya Pertumbuhan Investasi”* dengan indikator kinerja *“Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi”* sesuai dengan RPJMD tahun 2021 – 2026 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dapat dilihat bahwa dari realisasi dan capaian indikator kinerja tujuan pada tabel 3.3, berikut:

Tabel 3.4

**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1
“Meningkatnya Pertumbuhan Investasi”**

LKJiP Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	8%	38,65%	483%	0,79%

Formulasi terkait dengan capaian indikator kinerja tujuan pertama yakni Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi diperoleh dari Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun n dikurangi dengan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun n – 1, kemudian dibagi dengan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun n – 1, seperti di bawah ini:

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi} \\
 = & \frac{\text{Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun n} - \text{Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun n-1}}{\text{Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun n-1}} \times 100\% \\
 = & \frac{7.211.987.280.000,- - 5.201.734.930.000,-}{5.201.734.930.000,-} \times 100\% \\
 = & \frac{2.010.252.350.000,-}{5.201.734.930.000,-} \times 100\% \\
 = & \mathbf{38,65\%}
 \end{aligned}$$

Meningkatnya Pertumbuhan Investasi di Sumatera Barat diukur dari Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja sebagai tolok ukurnya yaitu Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi.

Dari tabel 3.3 diatas, dapat dilihat bahwa target indikator kinerja tujuan Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi tahun 2023 dari yang ditargetkan dalam RPJMD dan Renstra OPD sebesar **8%** dapat direalisasikan sebesar **38,65%** dengan tingkat capaian kinerja sebesar **483%** termasuk kategori keberhasilan **Memuaskan**.

Realisasi kinerja tujuan pertama dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi tahun 2023, yang terealisasi sebesar **38,65%** mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar **37,85%** dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 dimana realisasi kinerja Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi adalah sebesar **0,79%**.

LKJIP Tahun 2023

E. Realisasi Anggaran

URUSAN PENANAMAN MODAL

Urusan Penanaman Modal tahun 2023 dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota dengan total anggaran sebesar Rp.3.595.841.746,- dan realisasi keuangan Rp.3.490.339.105,- atau 97,07%.

1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

a) Program dan Kegiatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan OPD utama pelaksana urusan Urusan Penanaman Modal dengan melaksanakan 4 Program, 8 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan urusan Penanaman Modal. Rincian program dan kegiatan, anggaran dan realisasi pada APBD 2023 penyelenggaraan program dan kegiatan Urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.078.264.196	3.011.755.955
2 18 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.186.000	10.086.000
2 18 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.186.000	5.174.000
2 18 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	4.912.000
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.432.024.946	2.394.741.784
2 18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.421.868.946	2.384.591.784
2 18 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	4.997.000
2 18 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.156.000	5.153.000
2 18 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	273.501.250	273.222.441
2 18 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.001.000	994.000

LKJiP Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
2 18 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.000.000	21.999.100
2 18 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.990.800	2.979.320
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.138.700	18.138.500
2 18 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000	4.000.000
2 18 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.600.000	5.589.000
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	219.770.750	219.522.521
2 18 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.566.000	213.724.080
2 18 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	280.000	280.000
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.800.000	36.416.544
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183.486.000	177.027.536
2 18 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.986.000	119.981.650
2 18 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	160,980,000	116.451.650
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.430.000	3.530.000
2 18 02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	11.777.550	11.627.550
2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	11.777.550	11.627.550
2 18 02 2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	11.777.550	11.627.550
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	500.800.000	461.963.600
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	500.800.000	461.963.600
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	330.100.000	328.963.600
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	170.700.000	133.000.000
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	5.000.000	4.992.000

LKJIP Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	4.992.000
2 18 06 2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5.000.000	4.992.000

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, alokasi dan realisasi keuangan, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan rincian sebagai berikut:

Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan terdiri dari :

- 1) **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**, alokasi dana Rp. 5.186.000 Realisasi keuangan Rp. 5.174.000 (99,77%) dan Realisasi fisik 100 % , keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ,Capaian Kinerja berupa Terealisasinya Dokumen Renstra dan Renja DPMPTSP
- 2) **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**, alokasi dana Rp. 5.000.000 Realisasi keuangan Rp. 4.912.000 (98,24 %) dan Realisasi fisik 100 % , keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Capaian Kinerja berupa Tersusunnya Laporan Realisasi Kinerja DPMPTSP

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan terdiri dari :

LKJiP Tahun 2023

- 1) **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**, alokasi dana Rp. 2.421.868.946 Realisasi keuangan Rp. 2.384.591.784 (98,46%) dan Realisasi fisik 100 %, keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN, dengan Capaian Kinerja berupa Terealisasinya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**, alokasi dana Rp. 5.000.000 Realisasi keuangan Rp. 4.997.000 (99,94%) dan Realisasi fisik 100 %, keluaran dari sub kegiatan ini Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, dengan Capaian Kinerja berupa Terealisasinya Laporan Keuangan Semesteran Teralisasinya Laporan Keuangan Bulanan
- 3) **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD**, alokasi dana Rp. 5.156.000 Realisasi keuangan Rp.5.153.000 (99,94%) dan Realisasi fisik 100 %, keluaran dari sub kegiatan ini Terealisasinya Laporan Keuangan Semesteran Teralisasinya Laporan Keuangan Bulanan dengan Capaian Kinerja berupa tertibnya laporan keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran DPMPTSP yang akuntabel

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**, alokasi dana Rp. 1.001.000 keuangan Rp 994.000,- (99,30 %) dan Realisasi fisik 100 % keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan dengan Capaian Kinerja berupa Terpenuhinya Penyediaan Listrik dan Penerangan Perkantoran.
- 2) **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**, alokasi dana Rp. 22.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 21.999.100,- (100%) dan Realisasi fisik 100 %, keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkaoan Kantor yang disediakan dengan Capaian Kinerja berupa Terpenuhinya Peralatan dan Pelengkapan Kantor yang siap digunakan
- 3) **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**, alokasi dana Rp. 2.990.800,- Realisasi keuangan Rp. 2.973.320,- (99,62%) dan Realisasi fisik 100 %, keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediaka dengan Capaian Kinerja berupa Terwujudnya Kebersihan bangunan Kantor
- 4) **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan** alokasi dana Rp. 18.138.700,- Realisasi keuangan Rp. 18.138.500,- (100%) dan Realisasi fisik 100 %, keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan dengan Capaian Kinerja berupa Terwujudnya ADM Perkantoran yang Baik
- 5) **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** alokasi dana Rp. 4.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 4.000.000,- (100%) dan Realisasi fisik 100 %, keluaran

LKJiP Tahun 2023

dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dikumen bahan Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan Capaian Kinerja berupa Terwujudnya Peningkatan Wawasan dan Informasi Sumber Daya Aparatur

- 6) **Fasilitas Kunjungan Tamu** alokasi dana Rp. 5.600.000,- Realisasi keuangan Rp. 5.589.000,- (99,80%) dan Realisasi fisik 100 %, keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan Capaian Kinerja berupa Terlaksananya Pelayanan Tamu Kantor
- 7) **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** alokasi dana Rp. 219.770.750,- Realisasi keuangan Rp. 219.522.521,- (99,89%) dan Realisasi fisik 100 % , keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Capaian Kinerja berupa Terlaksananya Pekerjaan yang Berkaitan dengan Instansi Baik di Dalam maupun di Luar

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan terdiri dari :

1. **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** alokasi dana Rp. 280.000,- Realisasi keuangan Rp. 280.000 (100%) dan Realisasi fisik 100 % , keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Capaian Kinerja berupa adalah Terdistribusinya Surat Keluar dan Tercukupinya Benda Pos
2. **Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik** alokasi dana Rp. 58.800.000,- realisasi keuangan Rp. 36.416.544,- (61,93,%) dan Realisasi fisik 100 %, keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan dengan Capaian Kinerja Lancarnya Penyediaan Telepon, Internet, Air dan Listrik
3. **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** alokasi dana Rp. 183.486.000 realisasi keuangan Rp 177.027.536,- (96,48 %) dan Realisasi fisik 100 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan dengan Capaian Kinerja Terwujudnya Jasa Pelayanan ADM Perkantoran yang Efektif dan Efisien.

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan terdiri dari :

LKJiP Tahun 2023

- 1) **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas** Jabatan, alokasi dana Rp. 116.456.000,- Realisasi keuangan Rp. 116.451.650 (100%) dan Realisasi fisik 100 % , keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dielihara dan dibayarkan Pajaknya, dengan Capaian Kinerja Terawatnya dan Terpeliharanya serta terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas
- 2) **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** alokasi dana Rp. 3.530.000,- Realisasi keuangan Rp. 3.530.000 (100 %) dan Realisasi fisik 100 % , keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dengan Capaian Kinerja berupa Terpelihara dan Terawatnya Peralatan Mesin Kantor

2. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

2.1 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan terdiri dari :

1. **Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**, alokasi dana Rp. 11.777.550,- Realisasi keuangan Rp. 11.627.550 (98,73%) dan Realisasi fisik 100 % keluaran dari sub kegiatan ini Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah, dengan Capaian Kinerja berupa Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

3.1 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan terdiri dari :

1. **Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal**, alokasi dana Rp. 330.100.000,- Realisasi keuangan Rp. 328.963.600 (99,66%) dan Realisasi fisik 100 % keluaran dari sub kegiatan ini Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Capaian Kinerja berupa terlaksananya Sosialisasi sebanyak 15 (lima belas) kali dengan jumlah 1.432 (seribu empat ratus tiga puluh dua) Pelaku usaha dan adanya laporan hasil pembinaan dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.
2. **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal**, alokasi dana Rp. 170.700.000,- Realisasi keuangan Rp. 133.000.000 (77,91%) dan Realisasi fisik

LKJiP Tahun 2023

100% keluaran dari kegiatan ini Kesesuaian pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dengan dokumen Perizinan yang dimiliki oleh pelaku usaha dengan Capaian Kinerja berupa jumlah pengawasan investor pelaksanaan penanaman modal (266 perusahaan)

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

4.1 Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/KotaSub Kegiatan terdiri dari :

- 1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**, alokasi dana Rp. 5.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 4.992.000 (99,84%) dan Realisasi fisik 100 % keluaran dari sub kegiatan ini Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinin Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah Dikaji dan Dimanfaatkan dengan Capaian Kinerja Adanya Laporan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang sudah diterbitkan

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja								
No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMALSALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	DPMPTSP	<u>Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal</u>	<u>Permendagri 86 Tahun 2017</u>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1				<u>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>				
				<u>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</u>	17 <u>Dokumen</u>	17 <u>Dokumen</u>	-	-
				<u>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</u>	5 <u>Laporan</u>	5 <u>Laporan</u>	-	-

LKJiP Tahun 2023

2				<u>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</u>			-	-
				<u>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</u>	29 Orang	29 Orang	-	-
				<u>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</u>	1 laporan	1 laporan	-	-
				<u>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</u>	14 Lporan	14 Lporan	-	-
3				<u>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat</u>				
				<u>Daerah</u>				
				<u>Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</u>	1 Paket	1 Paket	-	-
				<u>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</u>	1 Paket	1 Paket	-	-
				<u>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</u>	1 Paket	1 Paket	-	-
				<u>Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</u>	1 Paket	1 Paket	-	-
				<u>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</u>	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
				<u>Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu</u>	1 laporan	1 laporan	-	-
				<u>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</u>	1 laporan	1 laporan	-	-

LKJiP Tahun 2023

4				<u>Kegiatan Penvediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>				
				<u>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</u>	1 laporan	1 laporan	-	-
				<u>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</u>	1 laporan	1 laporan	-	-
				<u>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</u>	1 laporan	1 laporan	-	-
5				<u>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>				
				<u>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</u>	20 Unit	20 Unit	-	-
				<u>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</u>	69 Unit	69 Unit	-	-
II				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
6				<u>Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</u>			-	-

LKJiP Tahun 2023

				<u>Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</u>	2 <u>Dokumen</u>	1 <u>Draf Kebijakan Penanaman</u> yaitu : <u>Draf Keputusan Kepala DPMPTSP tentang SOP Perizinan dan Non Perizinan</u>	-	-
				<u>Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</u>	1 <u>Kegiatan Usaha</u>	1 <u>Kegiatan Usaha</u>	-	-
7				<u>Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</u>				
				<u>Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota</u>	1 (satu) <u>dokumen</u>	-	-	-
III				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
8				<u>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</u>				
				<u>Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal</u>	100 %	-	-	-

LKJiP Tahun 2023

				<u>Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</u>	2 kali mengikuti <u>Pameran</u>	2 kali (<u>apkasi pameran promosi</u>)	-	-
IV				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
9				<u>Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu</u> <u>bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</u>				
				<u>Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan</u>	85 %	85 %	-	-
				<u>Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</u>				
				<u>Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal</u>	85 %	85 %	-	-
				<u>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah</u>	85 %	85 %	-	-
V				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.				

LKJIP Tahun 2023

10				<u>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</u>				
				<u>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</u>	60 Pelaku Usaha	125 Pelaku Usaha	-	-
				<u>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</u>	200 pelaku usaha	1.090 Pelaku usaha	-	-
				<u>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</u>	150 Kegiatan Usaha	131 Kegiatan Usaha	-	-
VI				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI				
				PENANAMAN MODAL				
11				<u>Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</u>				
				<u>Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</u>	19 laporan	19 laporan	-	-

LKJIP Tahun 2023

Dari tabel diatas,dapat dijelaskan bahwa ada beberapa sub kegiatan yang tidak terlaksana sesuai dengan Perjanjian Kinerja hal ini disebabkan karena tidak tersedianya anggaran.

D. Tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya

Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP

N o	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Tar get	Waktu Pelaksa naan	Penang gung jawab	Status/Pr ogres Penyeles aian	Kon disi Terk ini	Masalah yang dihadapi
1.	Evaluasi atas perencanaan kinerja							
a.	Agar Melakukan penyempurnaan perbaikan Dokumen Perencanaankinerja berupa Renja, RKT,PK dan Rencana Aksi	Dokumen perencanaan tidak bisa di lakukan penyempurnaan nya karena sudah di Perbupkan kecuali bila ada Perubahan RPJMD					Suda h ada	Tidak ada
b.	Agar satuan kerja Memahami dan peduli dan berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dengan membuat pernyataan bersama untuk memahami dan peduli dan belum berkomitmen dalam mencapai kinerja	Satuan Kerja sudah memahami, peduli dan berkomitmen dalam mencapai kinerja yang ditanda tangani oleh Bupati Lima Puluh Kota (PK)					Suda h ada	Tidak ada
c.	Agar setiap pegawai Memahami, peduli dan berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dengan membuat pernyataan bersama akan	Setiap pegawai sudah memahami, peduli dan berkomitmen dalam mencapai kinerja yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas					Suda h ada	Tidak ada

LKJIP Tahun 2023

	memahami, peduli dan berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan							
2.	Evaluasi atas pengukusan kinerja							
a.	Agar disusun definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja pada Renja OPD	Indikator Tingkat kinerja sudah diatur oleh PMK 212/PMK 207/tahun 2022						Tidak ada
b.	Agar Pengumpulan data kinerja memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)	Akan dilakukan pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan teknologi (Aplikasi)						Keterbatasan Anggaran
c.	Agar Pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan melalui ANJAB OPD	Iya, akan dilakukan Pengukuran kinerja dalam penempatan/penghapusan jabatan melalui ANJAB OPD						
d.	Agar Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) organisasi melalui ANJAB OPD	Iya, Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) organisasi melalui ANJAB OPD						
3.	Evaluasi atas pelaporan kinerja							
a.	Agar Dokumen laporan kinerja disampaikan tepat waktu	Akan disampaikan tepat waktu						
b.	Agar LKJIP menguraikan perbandingan realisasi kinerja	Dalam penyampaian LKjip akan menguraikan						

LKJIP Tahun 2023

	dengan realisasi kinerja dilevel nasional/internasional (Benchmark Kinerja)	perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel nasional						
c.	LKJIP digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja(Renja) yang akan dihadapi berikutnya	Perencanaan kinerja (Renja) sudah sesuai dengan matriknya						
d.	Agar Informasi dalam laporan kinerja dapat menghasilkan perubahan budaya kinerja organisasi	Agar Informasi dalam laporan kinerja dapat menghasilkan perubahan budaya kinerja organisasi						
4.	Evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal							
a.	Agar Membuat surat tugas Tim penyusunan Evaluasi LKJip	Akan dibuat surat tugas Tim penyusunan Evaluasi LKJip						
b.	Agar Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal sudah menggunakan aplikasi (e Sakip, absensi)						
c.	Agar Meningkatkan implementasi SAKIP dengan membuat laporan peningkatan implementasi AKIP di OPD dengan menggunakan rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Untuk meningkatkan implementasi SAKIP sudah dibuatLaporan capaian kinerja secara berkala (Triwulan, Semesteran, Tahunan)						

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini disusun sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan program dan kegiatan. Laporan ini menggambarkan pencapaian indikator kinerja yang disusun berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dimana keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan ini merupakan salah satu point untuk pencapaian Visi dan Misi Bupati yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendapat alokasi Anggaran pada Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022, Perbup No 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2022 yang dituangkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp. **4.178.852.373,-** Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2 (dua) program dengan 6 (enam) kegiatan, 25 sub kegiatan urusan penanaman modal dengan realisasi sebesar keuangan Rp.4.082.899.653,- atau 97,70%.

Dengan kondisi serapan anggaran sebagaimana tersebut diatas tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, karena secara fisik seluruh kegiatan terlaksana dengan baik. Dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung sasaran strategis organisasi, Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berhasil melakukan efisiensi terhadap penggunaan sumberdaya yang ada sehingga pada akhirnya juga berakibat kepada terwujudnya efisiensi anggaran.

Kondisi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 dapat dikatakan berjalan lancar, walaupun ada kendala-kendala yang memperlambat jalannya kegiatan. Namun kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan baik, sehingga persentase pencapaian realisasi fisik mencapai 100%. Ini artinya seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

4.2. Rekomendasi

Realisasi pencapaian target indikator sasaran yang ditetapkan pada awal tahun anggaran melalui Penetapan Kinerja merupakan gambaran dari kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam satu tahun anggaran. Kinerja yang tinggi berarti target yang telah ditetapkan dapat di capai sebagaimana mestinya.

Untuk lebih optimalnya pencapaian target yang ditetapkan pada indikator sasaran melalui penetapan kinerja, ada beberapa hal yang perlu disikapi antara lain:

-

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Inventaris
2. Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2022

DAFTAR BMD PADA PENGGUNA BARANG
ASET LAIN-LAIN
INTRAKOMPABEL/ INTRAKOMPABEL/ GABUNGAN INTRAKOMPABEL DAN EKSTRAKOMPABEL (1)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2023

PENGGUNA BARANG : ANETA BUDI PUTRA, AP, M.SI
KODE LOKASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Barang	Nama Barang	Nibar	Nomor Registrasi	Merek/ Tipe	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Lokasi	Titik Koordinat	Kendaraan Dinas			Jumlah Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	KET
									Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB							
NIHIL																		



Tanjung Pati, 31 Desember 2023
 Pengurus Barang

YULI DESWITA
 Nip. 19770701 200801 2 006

FORMAT 11.0.2.8

DAFTAR BMD PADA PENGGUNA BARANG
 ASET TIDAK BERWUJUD
 INTRAKOMPTABEL/ INTRAKOMPTABEL/ GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL (1)
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 TAHUN 2023

PENGGUNA BARANG
 KODE LOKASI

: ANETA BUDI PUTRA, AP, M.Si
 : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kode Barang (6)				Nama Barang (7)	Nibar (8)	Nomor Register (9)	Spesifikasi Nama Barang (10)	Spesifikasi Lainnya (11)	Lokasi (12)	Jumlah (13)	Satuan (14)	Harga Satuan Perolehan (Rp) (15)	Nilai Perolehan (Rp) (16)	Cara Perolehan (17)	Tanggal Perolehan (18)	Status Pengguna (19)	Keterangan (20)	
1	3	2	08	01	28	014	Website	0001	0001									
1	5	3	01	01	09	001	Film Bergerak dan Rekaman Video	0001	0001									
									Jl. Raya Negara KM. 8 Tj.Pati	1	Paket	10.000.000	10.000.000	APBD	2013	DPMPTSP	Portal Press	
									Jl. Raya Negara KM. 8 Tj.Pati	1	Paket	39.666.000	39.666.000	APBD	2018	DPMPTSP		
												49.666.000						

Tanjung Pati, 31 Desember 2023
 Pengurus Barang

YULI DESWIATA
 Nip. 19770701 200801 2 006

Mengesahui,
 Pengguna Barang
 ANETA BUDI PUTRA, AP, M.Si
 NIP. 197505151995011001

DAFTAR BMD PADA PENGGUNA BARANG
KEMITRAAN PIHAK KETIGA
INTRAKOMPABEL/ INTRAKOMPABEL/ GABUNGAN INTRAKOMPABEL DAN EKSTRAKOMPABEL (1)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2023

PENGGUNA BARANG : ANETA BUDI PUTRA, AP, M.Si
KODE LOKASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Barang	Nama Barang	Nlbar	Nomor Registrasi	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Jumlah	Satuan	Lokasi	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Bentuk Pemanfaatan	Nilai Pemanfaatan/ Pihak Pemfaat	Jangka Waktu			Sarat Perjanjian		Perubahan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	KET
													Jangka Waktu Pemanfaatan	Mulai	Berakhir	Nomor	Tanggal					
NIHIL																						

Tanjung Pati, 31 Desember 2023
Pengurus Barang

XULLIENITA
Nip. 19770701 40801 2 006

Mengetahui,
Pengguna Barang

ANETA BUDI PUTRA, AP, M.Si
NIP. 197505151995011001

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

**DAFTAR BMD PADA PENGGUNA BARANG
KONTRUKSI DALAM PEKERJAAN
KONTRUKSI DALAM PEKERJAAN INTRAKOMPTABEL/ INTRAKOMPTABEL/ GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL (1)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2023**

PENGGUNA BARANG : ANETA BUDI PUTRA, AP, M.SI
KODE LOKASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kode Barang	Nama Barang	Nibar	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Lokasi	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	KET
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				N I H I L										



Tanjung Pati, 31 Desember 2023
Pengurus Barang

(Signature)
YULI DESWITA
Nip. 19770701 200801 2 006

DAFTAR BMD PADA PENGGUNA BARANG
ASET TETAP LAINNYA INTRAKOMPTABEL/ INTRAKOMPTABEL/ GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL (1)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2023

PENGGUNA BARANG : ANETA BUDI PUTRA, AP, M.SI
KODE LOKASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kode Barang							Nama Barang	Nibar	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Lokasi	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Cara Peolehan	Tanggal Perolehan	Status Pengguna	Keterangan
(6)							(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	3	3	01	01	36	002	Taman	001	001	Taman	-	Jl. Raya Negara KM. 8 Tj.Pati	1	Buah	40.200.000	40.200.000	APBD	2018	DPMPSTP	
																40.200.000				

Tanjung Pati, 31 Desember 2023
 Pengurus Barang

YULI DESWITA
 Nip. 19770701 200801 2 006



**DAFTAR BMD PADA PENGGUNA BARANG
JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN
INTRAKOMPTABEL, EKSTRAKOMPTABEL/ GABUNGAN JARINGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL (1)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2023**

PENGGUNA BARANG : ANETA BUDI PUTRA, AP, M.Si
KODE LOKASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kode Barang								Nama Barang	Nibar	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/Jembatan/Jaringan	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Asal Usul	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Pengguna	Ket
(6)								(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	3	4	04	01	01	002	Telepon	0001	0001	-	-	-	Jl.Negara KM 8 Tanjung Pati			1	Unit	APBD	550.000	APBD	2011	DPMPTSP		
1	3	2	10	02	04	023	Wireless/ Wifi	0001	0001	-	-	-	Jl.Negara KM 8 Tanjung Pati			1	Paket	APBD	480.000	APBD	2011	DPMPTSP		
1	3	2	10	02	04	023	Wireless/ Wifi	0001	0001	-	-	-	Jl.Negara KM 8 Tanjung Pati			1	Paket	APBD	650.000	APBD	2015	DPMPTSP		
1	3	2	10	02	04	023	Wireless/ Wifi	0001	0001	-	-	-	Jl.Negara KM 8 Tanjung Pati			1	Paket	APBD	9.601.265	APBD	2017	DPMPTSP		
1	3	2	10	02	04	023	Wireless/ Wifi	0001	0001	-	-	-	Jl.Negara KM 8 Tanjung Pati			1	Paket	APBD	12.844.480	APBD	2017	DPMPTSP		
1	3	4	04	01	05	001	Pemasangan Instalasi Air	0001	0001	-	-	-	Jl.Negara KM 8 Tanjung Pati			1	Paket	APBD	4.703.800	APBD	2013	DPMPTSP	Mutasi / Hibah Dari Bag Umum	
1	3	4	04	02	03	001	Penambahan Daya Listrik	0001	0001	-	-	-	Jl.Negara KM 8 Tanjung Pati			1	Paket	APBD	1.035.708	APBD	2013	DPMPTSP	Mutasi / Hibah Dari Bag Umum	
1	3	4	04	01	01	002	Telepon	0001	0001	-	-	-	Jl.Negara KM 8 Tanjung Pati			1	Unit	APBD	3.330.000	APBD	2011	DPMPTSP	Mutasi / Hibah Dari Bag Umum	
																			33.195.253					



Tanjung Pati, 31 Desember 2023
Pengurus Barang

YULI DESMITA
NIP. 197707012408012008

**DAFTAR BMD PADA PENGGUNA BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN
INTRAKOMPTABEL/ EKSTRAKOMPTABEL/ GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL (1)
DIKAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2023**

PENGGUNA BARANG : ANETA BUDI PUTRA, AP, MSI
KODE LOKASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Barang	Nama Barang	Nibar	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Jumlah Lantai	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Pembangunan	Ket
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
1 3 3 01 01 01 005	Pembuatan Gazebo	0001-0002	0001-0002	Bata, Kayu	-	Jl. Raya Negara KM 8 Tl. Pati	-	-	2	Buah	3.000.000	6.000.000	Pembelian APBD	-	DPMPTSP	Mutasi / Hibah Dari Bagian Umum
1 3 3 01 03 13 003	Bahan Pembuatan Taman	0001	0001	Pasir, Tanah	-	Jl. Raya Negara KM 8 Tl. Pati	-	-	1	Paket	17.750.000	17.750.000	Pembelian APBD	-	DPMPTSP	Mutasi / Hibah Dari Bagian Umum
1 3 3 01 01 01 005	Pemasangan Paving Blok I	0001	0001	Semen	-	Jl. Raya Negara KM 8 Tl. Pati	-	-	1	Paket	20.651.000	20.651.000	Pembelian APBD	-	DPMPTSP	Mutasi / Hibah Dari Bagian Umum
1 3 3 01 01 01 005	Pemasangan Paving Blok II	0001	0001	Beton	-	Jl. Raya Negara KM 8 Tl. Pati	-	-	1	Paket	39.240.000	39.240.000	Pembelian APBD	-	DPMPTSP	Mutasi / Hibah Dari Bagian Umum
1 3 3 01 01 01 001	Bangunan Kantor BPIP	0001	0001	Beton	-	Jl. Raya Negara KM 8 Tl. Pati	-	-	1	Unit	*****	914.802.250	Pembelian APBD	-	DPMPTSP	Mutasi / Hibah Dari Bagian Umum
1 3 3 01 03 13 003	Taman dan Jaiian BPIP	0001	0001	Paasir	-	Jl. Raya Negara KM 8 Tl. Pati	-	-	1	Paket	*****	102.023.250	Pembelian APBD	-	DPMPTSP	Mutasi / Hibah Dari Bagian Umum
1 3 3 01 02 02 001	Rumah Dinas	0001	0001	Beton, Kayu	-	Jl. Raya Negara KM 8 Tl. Pati	-	-	1	Unit	61.087.000	61.087.000	Pembelian APBD	-	DPMPTSP	Mutasi / Hibah Dari Bagian Umum
1 3 3 04 01 04 001	Pembangunan Pagar BF4K	0001	0001	Beton, Besi	-	Jl. Raya Negara KM 8 Tl. Pati	-	-	1	Paket	*****	213.700.000	Pembelian APBD	-	DPMPTSP	Mutasi / Hibah Dari Bagian Umum
1 3 3 01 01 01 001	Rehab Gedung	0001	0001	Beton, Kayu, Besi	-	Jl. Raya Negara KM 8 Tl. Pati	-	-	1	Paket	99.533.000	99.533.000	Pembelian APBD	-	DPMPTSP	
1 3 3 01 01 008 001	Bangunan Tempat Ibadah (Musholla)	0001	0001	Beton, Kayu, Besi	-	Jl. Raya Negara KM 8 Tl. Pati	-	-	1	Unit	*****	144.170.000	Pembelian APBD	23-04-2018	DPMPTSP	
1 3 3 01 01 033 001	Tempat Parkir	0001	0001	Beton, Besi	-	Jl. Raya Negara KM 8 Tl. Pati	-	-	1	Buah	48.142.500	48.142.500	Pembelian APBD	24-09-2018	DPMPTSP	
1 3 3 01 01 01 001	Rehab Ruangan Fasilitasi	0001	0001	Beton, Besi, Kaca	-	Jl. Raya Negara KM 8 Tl. Pati	-	-	1	Paket	45.192.500	45.192.500	Pembelian APBD	06-12-2018	DPMPTSP	
1 3 3 01 01 008 001	Kelanjutan Pembangunan Tempat Ibadah (Musholla)	0001	0001	Beton, Kayu, Besi, Kaca	-	Jl. Raya Negara KM 8 Tl. Pati	-	-	1	Unit	27.307.199	27.307.199	Pembelian APBD	02-09-2019	DPMPTSP	
												1.739.598.699				



Tanjung Pati, 31 Desember 2023
Pengurus Barang

YULDESALTA
Nip. 197707012008012006

No	Uraian	Spesifikasi	Unit	Jumlah	Unit Price	Total	APBD	Tgl	SPM
1	Lay Top	0001	0001	1	15.000.000	15.000.000	APBD	2021	SPMPTP
1	Printer / Printer	0001 a/d 0005	0001 a/d 0005	8	1.960.000	15.680.000	APBD	2021	SPMPTP
2	Scanner	0001 a/d 0002	0001 a/d 0002	2	2.000.000	4.000.000	APBD	2021	SPMPTP
							450.836.383		
ALAT UKUR									
1	CDP	0001	0001	1	6.900.000	6.900.000	APBD	2021	SPMPTP
ALAT STUDIO & KOMUNIKASI									
1	Headset	0001	0001	1	2.850.000	2.850.000	APBD	2018	SPMPTP
1	Receiver (TV / ENP Unit)	0001	0001	1	2.000.000	2.000.000	APBD	2008	SPMPTP
1	Microprosesor Penggerak Suara	0001	0001	1	2.980.000	2.980.000	APBD	2014	SPMPTP
1	Laser Presentasi	0001	0001	1	980.000	980.000	APBD	2016	SPMPTP
1	Switcner (Radio AP)	0001	0001	1	2.780.000	2.780.000	APBD	2016	SPMPTP
1	Switcner (Radio AP)	0001	0001	1	1.600.000	1.600.000	APBD	2017	SPMPTP
							14.990.000		
ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA									
ENSTRA KOMPATABLE					EKSTRA KOMPATABLE				
1	Lembarang Garuda Pancasila	0001 a/d 0003	0001 a/d 0003	1	150.000	150.000	APBD	2007	SPMPTP
1	Kursi Biasa	0001 a/d 0049	0001 a/d 0049	10	400.000	4.000.000	APBD	2008	SPMPTP
1	Cermin Rias	0001	0001	1	100.000	100.000	APBD	2008	SPMPTP
1	Duplexner	0001	0001	1	200.000	200.000	APBD	2009	SPMPTP
1	Kursi Plastik	0001 a/d 0172	0001 a/d 0170	170	43.000	7.310.000	APBD	2011	SPMPTP
1	Mesa Meja Kantor	0001 a/d 0104	0001 a/d 0104	1	148.000	148.000	APBD	2011	SPMPTP
1	Figura Foto Bupati, Wabup, Gubernur, Wagub	0001 a/d 0004	0001 a/d 0004	4	400.000	1.600.000	APBD	2011	SPMPTP
							16.808.000		
							1.814.844.319		



Tanjung Pahl, 31 Desember 2023
Pengurus Barang

YULI DESWITA
Nip. 19770701 200801 2 006

1	3	2	10	01	01	001	0001	0001	Benq	Benq	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	1	Unit	8.650.000	8.650.000	AFBD	2011	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	002	0001	0001	Benq	Benq	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	2	Unit	10.400.000	20.800.000	AFBD	2011	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	003	0001	0001	Epson	Epson	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	1	Unit	2.700.000	2.700.000	AFBD	2011	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	004	0001	0001	Epson	Epson	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	2	Unit	1.400.000	2.800.000	AFBD	2011	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	005	0001	0001	Samsung	Samsung	Fiber/Wifi	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	2	Unit	8.970.000	8.970.000	AFBD	2011	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	006	0001	0001	-	-	Fiber/Wifi	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	2	Unit	7.024.847	21.110.000	AFBD	2012	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	007	0001	0001	HP	HP	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	2	Unit	4.470.000	4.470.000	AFBD	2012	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	008	0001	0001	Acer	Acer	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	1	Unit	9.950.000	9.950.000	AFBD	2012	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	009	0001	0001	Thomson	Thomson	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	1	Unit	4.450.000	4.450.000	AFBD	2012	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	010	0001	0001	Samsung	Samsung	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	1	Unit	1.160.000	2.510.000	AFBD	2012	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	011	0001	0001	Canon	Canon	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	2	Unit	7.500.000	7.500.000	AFBD	2012	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	012	0001	0001	Acer S 300 CA	Acer S 300 CA	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	1	Unit	7.500.000	7.500.000	AFBD	2012	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	013	0001	0001	Acer S 300 CA	Acer S 300 CA	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	1	Unit	7.500.000	7.500.000	AFBD	2012	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	014	0001	0001	Acer S 300 CA	Acer S 300 CA	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	1	Unit	1.500.000	1.500.000	AFBD	2012	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	015	0001	0001	Samsung	Samsung	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	1	Unit	850.000	850.000	AFBD	2012	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	016	0001	0001	Canon IP 270	Canon IP 270	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	1	Unit	1.600.000	1.600.000	AFBD	2012	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	017	0001	0001	Feistron 2 Core	Feistron 2 Core	Aluminium	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	1	Unit	3.958.250	3.958.250	AFBD	2014	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	018	0001	0001	Axus	Axus	Fiber/Beef	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	1	Unit	987.500	987.500	AFBD	2014	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	019	0001	0001	Canon	Canon	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	1	Unit	2.500.000	2.500.000	AFBD	2013	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	020	0001	0001	-	-	-	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	1	Unit	950.000	950.000	AFBD	2014	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	021	0001	0001	Canon MG 2570	Canon MG 2570	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	5	Unit	850.000	4.250.000	AFBD	2014	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	022	0001	0001	Lenovo	Lenovo	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	1	Unit	7.370.000	7.370.000	AFBD	2014	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	023	0001	0001	Canon	Canon	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	2	Unit	967.500	1.935.000	AFBD	2015	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	024	0001	0001	Axus	Axus	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	1	Unit	8.000.000	8.000.000	AFBD	2015	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	025	0001	0001	HP	HP	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	1	Unit	8.000.000	8.000.000	AFBD	2015	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	026	0001	0001	Axus M81m-E	Axus M81m-E	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	1	Unit	5.400.000	5.400.000	AFBD	2014	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	027	0001	0001	Axus	Axus	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	1	Unit	8.900.000	8.900.000	AFBD	2016	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	028	0001	0001	Canon MP 287	Canon MP 287	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	2	Unit	1.200.000	2.400.000	AFBD	2016	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	029	0001	0001	Axus X455LP	Axus X455LP	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	4	Unit	4.900.000	27.600.000	AFBD	2017	DPHPTP	Hiang 1 Unit Bertamkano STAKB, SR NO-STAKB: 1692/VII/2018 ng 25 Juli 2018, Pemakai An. AMBARDI, SE-NM
1	3	2	10	01	01	030	0001	0001	Axus A4563U/GADYG	Axus A4563U/GADYG	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	1	Unit	8.825.250	8.825.250	AFBD	2017	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	031	0001	0001	Brother DCP T100	Brother DCP T100	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	2	Unit	2.705.033	5.410.066	AFBD	2017	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	032	0001	0001	Brother MF-J 100	Brother MF-J 100	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	1	Unit	3.588.666	3.588.666	AFBD	2017	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	033	0001	0001	Brother MF-J 100	Brother MF-J 100	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	2	Unit	8.900.000	17.800.000	AFBD	2017	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	034	0001	0001	Brother MF-J 100	Brother MF-J 100	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	1	Unit	1.400.000	1.400.000	AFBD	2017	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	035	0001	0001	Brother MF-J 100	Brother MF-J 100	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	2	Unit	12.481.840	27.958.670	AFBD	2017	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	036	0001	0001	Brother MF-J 100	Brother MF-J 100	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	1	Unit	11.200.000	11.200.000	AFBD	2017	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	037	0001	0001	Brother MF-J 100	Brother MF-J 100	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	2	Unit	5.400.000	10.800.000	AFBD	2017	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	038	0001	0001	Brother MF-J 100	Brother MF-J 100	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	1	Unit	8.440.000	8.440.000	AFBD	2017	DPHPTP	Mutasi/ Hibah Dari Bagian Umum
1	3	2	10	01	01	039	0001	0001	Canon PIXMA N1497	Canon PIXMA N1497	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	2	Unit	1.608.400	3.216.800	AFBD	2018	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	040	0001	0001	Lenovo V110	Lenovo V110	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	2	Unit	7.918.500	15.837.000	AFBD	2018	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	041	0001	0001	HP145-CP2006TUS Silver	HP145-CP2006TUS Silver	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	2	Unit	9.400.000	18.800.000	AFBD	2019	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	042	0001	0001	Canon MP247	Canon MP247	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	2	Unit	1.374.800	2.749.600	AFBD	2019	DPHPTP	
1	3	2	10	01	01	043	0001	0001	Axus Expert Book Core03	Axus Expert Book Core03	Fiber	II Kaya Negara KM 8 Taulang Pati	2	Unit	10.900.000	21.800.000	AFBD	2021	DPHPTP	

1	3	2	08	01	003	Mesra 1A	0001	0001	Olympia	Olympia	-	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	1	Unit	8.000.000	8.000.000	AFBD	2008	DPNPTP
1	3	2	08	02	004	Mesra 1B	0001	0001	-	-	-	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	2	Buah	1.000.000	2.000.000	AFBD	2008	DPNPTP
1	3	2	08	03	005	Kamera Digital	0001	0001	Canon M 802	Canon M 802	Fiber	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	1	Buah	2.500.000	2.500.000	AFBD	2009	DPNPTP
1	3	2	08	04	006	AC Unit	0001	0001	Pakemint	Pakemint	-	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	4	Unit	4.998.000	19.992.000	AFBD	2009	DPNPTP
1	3	2	08	05	007	Kursi Kerja Beselot II	0001	0001	Proel Line	Proel Line	-	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	4	Buah	800.000	3.200.000	AFBD	2010	DPNPTP
1	3	2	08	06	008	Kursi Kerja	0001	0001	Udhwa	Udhwa	-	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	20	Buah	345.000	6.900.000	AFBD	2010	DPNPTP
1	3	2	08	07	009	Lesani Amp	0001	0001	-	-	Kayu	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	2	Buah	3.871.800	7.743.600	AFBD	2010	DPNPTP
1	3	2	08	08	010	Pilling Kabiner	0001	0001	Mitsuba	Mitsuba	Besi	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	1	Buah	2.000.000	2.000.000	AFBD	2010	DPNPTP
1	3	2	08	09	011	Mesra 1B	0001	0001	-	-	Kayu	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	4	Buah	1.400.000	5.600.000	AFBD	2010	DPNPTP
1	3	2	08	10	012	Lesani Amp	0001	0001	-	-	Fiber/Vert	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	2	Buah	2.400.000	4.800.000	AFBD	2010	DPNPTP
2	3	2	08	11	013	Drakon	0001	0001	-	-	Besi	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	1	Buah	4.700.000	4.700.000	AFBD	2010	DPNPTP
1	3	2	08	12	014	Pilling Kabiner	0001	0001	-	-	Besi	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	2	Buah	3.000.000	6.000.000	AFBD	2010	DPNPTP
1	3	2	08	13	015	AC Unit	0001	0001	LQ	LQ	Fiber/Vert	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	1	Unit	4.975.000	4.975.000	AFBD	2011	DPNPTP
1	3	2	08	14	016	Kursi Kerja (sambal)	0001	0001	-	-	Alumunium	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	1	Buah	7.000.000	7.000.000	AFBD	2011	DPNPTP
1	3	2	08	15	017	Mesra 1A	0001	0001	elimpik	elimpik	Kayu	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	2	Buah	900.000	1.800.000	AFBD	2011	DPNPTP
1	3	2	08	16	018	Kursi Tamb	0001	0001	-	-	Besi	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	2	Buah	1.600.000	3.200.000	AFBD	2011	DPNPTP
1	3	2	08	17	019	Mesra 1A	0001	0001	Udhwa	Udhwa	Besi	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	1	Buah	1.980.000	1.980.000	AFBD	2011	DPNPTP
1	3	2	08	18	020	Mesra 1A	0001	0001	Nabalita	Nabalita	Plastik	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	1	Buah	2.400.000	2.400.000	AFBD	2011	DPNPTP
1	3	2	08	19	021	Alat Pengukur Kemat	0001	0001	Ecure	Ecure	Plastik	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	1	Buah	2.400.000	2.400.000	AFBD	2011	DPNPTP
1	3	2	08	20	022	Thermal LCD	0001	0001	-	-	Fiber/ Besi	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	2	Buah	3.600.000	7.200.000	AFBD	2011	DPNPTP
1	3	2	08	21	023	Lesani Kayu	0001	0001	-	-	Kayu	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	1	Buah	2.200.000	2.200.000	AFBD	2011	DPNPTP
1	3	2	08	22	024	Kamera Digital SLR	0001	0001	-	-	-	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	1	Unit	8.100.000	8.100.000	AFBD	2011	DPNPTP
1	3	2	08	23	025	Lesani Propektor	0001	0001	-	-	-	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	1	Unit	4.510.000	4.510.000	AFBD	2012	DPNPTP
1	3	2	08	24	026	Lesani Amp Diamb II	0001	0001	-	-	Kayu	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	4	Buah	1.485.000	5.940.000	AFBD	2012	DPNPTP
1	3	2	08	25	027	Pilling Kabiner	0001	0001	LION	LION	Besi	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	3	Buah	2.493.000	7.479.000	AFBD	2012	DPNPTP
1	3	2	08	26	028	Mesra 1A	0001	0001	Olympia	Olympia	Besi	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	2	Buah	2.510.000	5.020.000	AFBD	2012	DPNPTP
1	3	2	08	27	029	Kipas Angin	0001	0001	Miyako	Miyako	Fiber	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	1	Buah	300.000	300.000	AFBD	2012	DPNPTP
1	3	2	08	28	030	Kursi Kerja	0001	0001	Vibos	Vibos	-	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	5	Buah	797.500	3.987.500	AFBD	2012	DPNPTP
1	3	2	08	29	031	Mesra 1A	0001	0001	-	-	Kayu	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	4	Buah	600.000	2.400.000	AFBD	2012	DPNPTP
1	3	2	08	30	032	Tangga	0001	0001	Fortusa	Fortusa	Alumunium	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	1	Buah	950.000	950.000	AFBD	2012	DPNPTP
1	3	2	08	31	033	Kursi Kasepatan	0001	0001	-	-	Kayu	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	1	Buah	19.910.000	19.910.000	AFBD	2012	DPNPTP
1	3	2	08	32	034	Infu	0001	0001	-	-	Kayu/Besa	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	1	Unit	6.930.000	6.930.000	AFBD	2012	DPNPTP
1	3	2	08	33	035	Kursi Pengaduan	0001	0001	-	-	Kayu	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	14	Buah	325.000	4.550.000	AFBD	2012	DPNPTP
1	3	2	08	34	036	Lesani Amp Sambal	0001	0001	-	-	Kayu	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	1	Buah	2.250.000	2.250.000	AFBD	2012	DPNPTP
1	3	2	08	35	037	Papan Tulis	0001	0001	-	-	-	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	1	Buah	5.200.000	5.200.000	AFBD	2012	DPNPTP
1	3	2	08	36	038	Mesra 1A	0001	0001	Olimpik	Olimpik	Kayu	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	2	Buah	960.000	1.920.000	AFBD	2012	DPNPTP
1	3	2	08	37	039	Mesra 1A	0001	0001	-	-	Kayu	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	2	Buah	1.080.000	2.160.000	AFBD	2014	DPNPTP
1	3	2	08	38	040	Lesani Kayu	0001	0001	-	-	Kayu	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	2	Buah	2.400.000	4.800.000	AFBD	2014	DPNPTP
1	3	2	08	39	041	Mesra 1A	0001	0001	Olympia	Olympia	Besi	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	1	Buah	2.800.000	2.800.000	AFBD	2014	DPNPTP
1	3	2	08	40	042	Kursi Kerja Beselot II	0001	0001	Olympia	Olympia	-	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	3	Buah	800.000	2.400.000	AFBD	2014	DPNPTP
1	3	2	08	41	043	Dispenser	0001	0001	Nasional	Nasional	Fiber	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	1	Buah	400.000	400.000	AFBD	2014	DPNPTP
1	3	2	08	42	044	Mesra 1A	0001	0001	-	-	Kayu	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	1	Buah	5.250.000	5.250.000	AFBD	2014	DPNPTP
1	3	2	08	43	045	Borsi Kerja Pelekat Beselot II	0001	0001	-	-	Fiber/ Besa	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	1	Buah	3.500.000	3.500.000	AFBD	2014	DPNPTP
1	3	2	08	44	046	Kursi Tamb	0001	0001	-	-	Besi/ Fiber	II Raja Negara KM 1 Taalung Pati	4	Buah	1.100.000	4.400.000	AFBD	2014	DPNPTP

**DAFTAR BMD PADA PENGGUNA BARANG
TANAH
INTRAKOMPTABEL/ INTRAKOMPTABEL/ GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL (1)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2023**

PENGGUNA BARANG : ANETA BUDI PUTRA, AP, M.SI

KODE LOKASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Barang	Nama Barang	Nibar	Nomor Registrasi	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Jumlah	Satuan	Lokasi	Titik Koordinat	Bukti Kepemilikan			Harga Satuan Perolehan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	KET
										Nama	Nomor	Tanggal							
NIHIL																			



Tanjung Pati, 31 Desember 2023
Pengurus Barang

YULL DESWITA
Nip. 197707012008012006



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Negara KM.8 Tanjung Pati Telp/Fax. (0752) 7991016
Website : dpmptsp.limapuluhkotakab.go.id Email : dpmptspkab50kota@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANETA BUDI PUTRA, AP,M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Jabatan : BUPATI LIMA PULUH KOTA

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Pati, Januari 2023

Pihak Kedua
BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Pihak Pertama
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ANETA BUDI PUTRA, AP, M.Si
NIP. 19750515 199501 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Negara KM.8 Tanjung Pati Telp/Fax. (0752) 7991460
Website : dpmptsp.limapuluhkotakab.go.id Email : dpmptspkab50kota@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A	Meningkatnya investasi	1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) 2. Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) 3. Nilai Realisasi PMDN 4. Nilai Realisasi PMA	3.226 Investor 421.087.307.347 399.174.178.105 2.409.723.140
B	Meningkatnya mutu pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan	Skor 84,9 (B)
C	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Nilai Sasaran Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan OPD	71

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota/Kota	3.933.973.513	
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	155.001.450	
3. Program Promosi Penanaman Modal	77.359.700	
4. Program Pelayanan Penanaman Modal	65.000.000	
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	513.384.250	
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	37.624.900	

Tanjung Pati, Januari 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

ANETA BUDI PUTRA, AP, M.Si
NIP. 19750515 199501 1 001